

RINGKASAN

Pengaturan mengenai status perampasan terhadap barang bukti yang disita dalam tindak pidana narkoba telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba pada ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan “dirampas untuk negara”. Namun, pada praktiknya banyak hakim yang menetapkan status perampasan terhadap barang bukti pada tindak pidana narkoba agar “dirampas untuk dimusnahkan”.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penentuan status barang bukti yang disita dalam tindak pidana narkoba serta menganalisis tepat tidaknya terhadap barang bukti yang disita dalam tindak pidana narkoba hakim menetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Jenis penelitian dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan.

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa penentuan status barang bukti yang disita dalam tindak pidana narkoba adalah dimulai dari kepolisian dengan melakukan penyitaan terhadap barang bukti kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk diajukan ke pengadilan. Di persidangan hakim akan memeriksa barang bukti untuk menilai keabsahan dan kekuatan barang bukti sebagai dasar bagi hakim untuk menetapkan status barang bukti dalam putusan. Berdasarkan teori kebebasan hakim dan penafsiran hukum sistematis, dalam menentukan status barang bukti yang disita pada tindak pidana narkoba hakim dapat mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba karena dualisme pengaturan tersebut saling terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Hal tersebut dilakukan untuk tercapainya suatu putusan yang adil dan bermanfaat. Penetapan status perampasan oleh hakim terhadap barang bukti yang disita dalam tindak pidana narkoba agar dirampas untuk dimusnahkan berdasarkan teori kebebasan hakim dan teori tujuan hukum adalah penetapan yang tepat apabila barang bukti dalam tindak pidana narkoba tersebut jumlahnya sedikit sehingga dapat merugikan negara karena jika dilakukan lelang dengan peserta yang tentunya terbatas dan sudah memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maka harga jual barang tersebut akan lebih rendah dari biaya pelaksanaan lelang. Namun Apabila barang bukti dalam tindak pidana narkoba jumlahnya banyak dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara maka lebih tepat ditetapkan dirampas untuk negara karena terjaminnya ketersediaan narkoba dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat akan mempermudah perusahaan farmasi untuk mendapatkan narkoba guna pelayanan kesehatan dan juga mempermudah lembaga yang berwenang seperti BNN, Bea Cukai dan Kepolisian untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pelatihan dan ketrampilan.

SUMMARY

The provisions regarding the status of confiscation of evidence confiscated in narcotics crimes have been specifically regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics in the provisions of Article 101 paragraph (1) and Article 136 that Narcotics, Narcotics Precursors, and tools or goods used in Narcotics and Narcotics Precursor crimes or those related to Narcotics and Narcotics Precursors and the results are declared "confiscated for the state". However, in practice, many judges determine the status of confiscation of evidence in narcotics crimes to be "confiscated for destruction".

The purpose of this study is to analyze the determination of the status of evidence confiscated in narcotics crimes and to analyze the appropriateness of the judge's determination of confiscated evidence in narcotics crimes to be confiscated for destruction. The type of research and approach method used in this study is Empirical Jurisprudence. The data sources used are primary data obtained from interviews with informants and secondary data obtained from laws and regulations, literature, legal doctrine, and relevant court decisions.

The results of this study explain that the determination of the status of confiscated evidence in narcotics crimes begins with the police confiscating the evidence and then transferring it to the prosecutor's office to be submitted to the court. At the trial, the judge will examine the evidence to assess the validity and strength of the evidence as a basis for the judge to determine the status of the evidence in the decision. Based on the theory of judicial independence and systematic legal interpretation, in determining the status of confiscated evidence in narcotics crimes, the judge can base it on the Criminal Procedure Code and Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics because the dualism of these regulations is interrelated and complements each other. This is done to achieve a fair and beneficial decision. The determination of the status of confiscation by the judge of the evidence confiscated in narcotics crimes to be confiscated for destruction based on the theory of judicial independence and the theory of legal objectives is the right determination if the evidence in the narcotics crime is small in number so that it can harm the state because if an auction is held with participants who are certainly limited and already have permission from the Ministry of Health then the selling price of the goods will be lower than the cost of implementing the auction. However, if the evidence in narcotics crimes is large in number and can be used for the benefit of the state, it is more appropriate to determine that it is confiscated for the state because the guaranteed availability of narcotics with strict supervision and control will make it easier for pharmaceutical companies to obtain narcotics for health services and also make it easier for authorized institutions such as the BNN, Customs and Police for the purposes of education, research, training and skills.